

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### 2.1 KAJIAN PUSTAKA

Peneliti disini mengkaji atas penelitian-penelitian sebelumnya yang dimana penelitian tersebut hampir sama sehingga peneliti jadikan sebuah rujukkan untuk menulis. Peneliti mengkaji beberapa penelitian sebelumnya agar menghindari dari adanya plagiarisme. Penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut :

Attila Balla (2000) meneliti tentang *Factors Influencing Defense Expenditures – A Hungarian Perspective*. Hasil dari penelitian ini adalah yang mempengaruhi *defense expenditures* diantaranya *Economic condition of the country, Military alliances, External threat, Internal political factors* dan *Military strategic factors*.

Posma Sariguna J.K. Hutasoit meneliti tentang “GUNS VERSUS BUTTER” Upaya Peningkatan Anggaran Militer untuk Peningkatan Kesejahteraan. Pengeluaran pertahanan dan perekonomian memberikan hubungan saling mempengaruhi yang tak dapat dihindarkan. Pengaruh pengeluaran pertahanan nasional terhadap perekonomian nasional dapat mempengaruhi permintaan dan produksi nasional melalui organisasi produksi, alokasi dan mobilisasi sumber-sumber daya, ancaman eksternal, dan struktur ekonomi. Peningkatan anggaran pertahanan dipengaruhi peningkatan perekonomian, dan peningkatan perekonomian dipengaruhi oleh

suasana aman yang ditimbulkan dari fungsi anggaran pertahanan, maka anggaran pertahanan nasional memang perlu diperhatikan bahkan ditingkatkan.

J. Danang Widoyoko (2005) meneliti tentang Menyoal Anggaran Pertahanan. Jurnal ini membahas tentang efisiensi Anggaran pertahanan dan keterkaitan antaran pertahanan, pendidikan dan kesehatan. Dalam penyusunan anggaran, yang menjadi pertimbangan utama adalah prioritas. Sebesar apa pun dana yang dimiliki, tetap saja ada batasnya. Penulis juga menganalisis korelasi anggaran beberapa Negara. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa China dan India menunjukkan korelasi yang tinggi. Setiap kenaikan anggaran China akan diimbangi penambahan anggaran oleh India.

Analisis korelasi juga menunjukkan, Indonesia dengan Malaysia dan Thailand menunjukkan korelasi yang positif dengan signifikansi yang sangat tinggi. Indonesia akan menambah anggaran pertahanannya ketika Malaysia dan Thailand menambah alokasinya. Begitu juga sebaliknya.

Dedi Darfians (2012) meneliti tentang Fungsi Anggaran Pertahanan Dalam Pertumbuhan Ekonomi. Penelitian ini menggunakan variabel anggaran pertahanan, PDB, jumlah penduduk, PDB per kapita, dan jumlah penduduk per kapita. Data tersebut diolah menggunakan analisis korelasi dan regresi dengan software SPSS17. Hasil dari penelitian ini adalah anggaran pertahanan memiliki korelasi positif secara signifikan dengan anggaran pertahanan per kapita dan PDB per kapita. Hal ini penting, mengingat bukan hanya nominal Anggaran saja yang tinggi (pertumbuhan), akan tetapi harus ada unsur pemerataan Anggaran (pembangunan) yang dapat dinikmati oleh tiap penduduk.

Dalam penelitian yang dilakukan Dedi Darfians ini, Anggaran pertahanan terbukti dapat mendorong pertumbuhan ekonomi, mengarah kepada pembentukan SDM, menyediakan perlindungan kepada warga negara, meningkatkan produktivitas, dan menyediakan manfaat langsung teknologi. Besaran nominal anggaran pertahanan tidak harus secara nominal saja yang tinggi (pertumbuhan), akan tetapi harus ada unsur pemerataan anggaran pertahanan (pembangunan) yang dapat dinikmati oleh tiap penduduk secara merata.

Adi Joko Purwanto (2010) meneliti tentang Peningkatan Anggaran Militer Cina Dan Implikasinya Terhadap Keamanan Di Asia Timur. Modernisasi angkatan bersenjata Cina menjadi salah satu alasan yang penting bagi Cina dalam meningkatkan anggaran belanja militer. Dampak dari peningkatan anggaran militer Cina di kawasan Asia Timur, sesungguhnya tidak cukup signifikan dalam mempengaruhi konstelasi keamanan di kawasan tersebut.

Penulis melihat terdapat dua faktor utama yang mempengaruhi peningkatan anggaran belanja militer dan pertahanan angkatan bersenjata Cina. Pertama faktor internal yang berasal dari dalam negeri. Pertumbuhan Ekonomi dan program modernisasi militer Cina. Pertumbuhan ekonomi dari Cina yang terus meningkat mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan anggaran belanja militer dan pertahanan angkatan bersenjata Cina. Kedua adalah faktor eksternal. Ancaman keamanan stabilitas di kawasan Asia Timur mempunyai pengaruh bagi Cina untuk mengambil kebijakan meningkatkan anggaran belanja pertahanan dan militer.

Dalam jurnal ini juga menjelaskan tentang terus meningkatnya anggaran militer Cina setiap tahunnya memungkinkan Cina menjadi Negara dengan sebutan “*The Next Super Power* ” setelah Amerika Serikat. Dalam masa yang akan datang Cina akan berusaha megambil peran yang lebih bahkan melebihi peran Amerika Serikat dalam masalah perdamaian dan pertahanan dunia.

## **2.2 LANDASAN TEORI DAN HIPOTESIS**

### **2.2.1 Anggaran Pertahanan**

Pada dasarnya Anggaran merupakan bentuk dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam besaran angka dan berlaku untuk jangka waktu tertentu. Dalam Nota Keuanagterdapat uraian – uraian yang sangat jelas terkait Anggaran militer (atau pengeluaran militer), juga dikenal dengan anggaran pertahanan adalah jumlah sumber daya keuangan yang dikeluarkan oleh suatu negara atau entitas lainnya untuk meningkatkan dan mempertahankan angkatan bersenjata. Anggran militer seringkali mencerminkan seberapa kuat pertahanan suatu negara terhadap ancaman dari pihak lain. Anggran pada dasarnya memiliki fungsi yang sangat besar untuk negara.

Tujuan dari pengeluaran militer sendiri adalah untuk menyediakan pertahanan militer yang kuat bagi suatu negara dan menjaga keamanan bagi para warga negara (Buku Putih Pertahanan Republik Indonesia). Menurut Adam Smith tugas melindungi masyarakat perlu dilakukan oleh kekuatan pertahanan yang merupakan kewajiban pertama.

Menurut Kuno (1999:17), pengeluaran belanja militer merupakan sebuah ukuran terhadap pengeluaran yang digunakan dalam sistem pertahanan sebuah Negara. Perbelanjaan militer merupakan suatu yang sangat penting bagi sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Dan menjadi sangat penting bagi setiap negara untuk menjaga sistem pertahanan negaranya (SIPRI).

Anggaran pertahanan dapat berfungsi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, mengarah kepada pembentukan SDM, menyediakan perlindungan kepada warga negara, meningkatkan produktivitas, dan menyediakan manfaat langsung teknologi (Pradhan, 2010).

Menurut R.P Smith (1989) Kebijakan untuk menaikkan atau meningkatkan anggaran militer sangat dipengaruhi oleh faktor ekonomi dalam negeri yaitu pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam makalah yang ditulis oleh J. Danang Widoyoko "Menyoal Anggaran Pertahanan", terdapat beberapa faktor lain yang perlu diperhatikan sebelum menyatakan setuju untuk meningkatkan anggaran pertahanan. Pertama, kondisi keuangan pemerintah yang terbatas. Situasi ini memberatkan keuangan Negara sehingga peningkatan anggaran pertahanan sulit untuk direalisasikan karena keterbatasan dana.

Kedua, peningkatan anggaran pertahanan bisa menjadi kontraproduktif dengan program ekonomi pemerintah untuk meningkatkan angka pertumbuhan ekonomi. Salah satu persyaratan untuk meningkatkan pertumbuhan adalah dengan meningkatkan investasi dan jumlah tabungan

swasta dan masyarakat. Padahal secara teoritis, peningkatan anggaran pertahanan melalui peningkatan pajak akan menyebabkan turunnya kemampuan menabung dan perusahaan swasta akan kekurangan modal untuk investasi (Chan, 1985 dalam Heo, 1999). Selanjutnya, dalam makalah tersebut juga menjelaskan bahwa dalam peningkatan anggaran pemerintah dalam melakukan peminjaman. Baik peminjaman luar negeri maupun menerbitkan surat utang Negara. Tentunya tindakan terkait peminjaman luar negeri dan utang dalam negeri bukan tindakan yang sesuai. Maka dari itu, dalam jangka panjang justru akan terjadi penurunan daya saing perekonomian Indonesia secara keseluruhan ketika terjadi peningkatan anggaran pertahanan (Chan, 1985 dalam Heo, 1999).

Ketiga, Menurut J. Danang Widoyoko, tidak ada kontribusi secara langsung antara peningkatan anggaran pertahanan dan pertumbuhan ekonomi. Beberapa peneliti dan pengamat berpendapat bahwa belanja pertahanan memberikan manfaat secara tidak langsung kepada perekonomian negara. Sektor pertahanan Indonesia belum bisa diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian Indonesia. Kenaikan anggaran pertahanan berarti hanya sebatas meningkatkan belanja Negara tanpa adanya pengembalian yang memadai.

Selanjutnya, Menurut Uk Heo (1996) terdapat tiga perbedaan perspektif yang cukup tajam terkait anggaran pertahanan dengan perekonomian, yaitu :

1. *The defense-growth tradeoff*

Pada Kelompok ini mengemukakan terdapat hubungan negatif antara pengeluaran pertahanan dengan pertumbuhan ekonomi. Teori ini diantaranya dikemukakan oleh beberapa ahli seperti Deger (1986), Deger & Sen (1983), Deger & Smith (1983), Faini et.all (1984), Lim (1983). Literatur pengaruh negatif dari pengeluaran pertahanan ini memfokuskan pada dua jenis *tradeoff*, yaitu : efek alokasi (*the 'guns vs butter tradeoff*), dan efek pertumbuhan (*the 'guns vs growth' tradeoff*). Logika dari efek alokasi (*allocation effect*) adalah bahwa penyerapan dari pengeluaran pemerintah pada pertahanan akan menyebabkan kelangkaan dana untuk proyek-proyek kesejahteraan publik, seperti pendidikan dan kesehatan. Argumen yang berhubungan dengan efek pertumbuhan (*growth effect*) adalah adanya *dampening effect* pada investasi yang menyebabkan perlambatan dalam pertumbuhan ekonomi.

## 2. *The spin off effect*

Pada Kelompok kedua ini mengemukakan bahwa pengeluaran pertahanan memberikan dampak positif pada pertumbuhan ekonomi. Teori ini dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya Benoit (1978), Kaldor (1976) dan Weede (1983). Argumen utama teori ini adalah bahwa pengeluaran pertahanan akan memberikan stimulasi pada pertumbuhan ekonomi baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan meningkatnya daya beli maka terjadi peningkatan permintaan agregat dan eksternalitas positif dari produksi. Dengan demikian program-program pertahanan akan menyediakan lapangan kerja, pendidikan dan

pelatihan teknik untuk banyak orang, penyaluran investasi dari sektor swasta yang memiliki banyak dana.

### 3. *Neutral/insignificant relationship*

Pada Kelompok ketiga menemukan bahwa tidak ada hubungan antara pengeluaran pertahanan militer dan pertumbuhan ekonomi. Teori ini dikemukakan oleh beberapa ahli diantaranya Biswas & Ram (1986), DeRouen (1993), Mintz & Stevenson (1995). Menurut Biswas & Ram (1986), pengeluaran pertahanan bisa saja memberikan efek negatif maupun efek positif dengan pertumbuhan pada waktu tertentu dan kondisi tertentu saja. pengeluaran pertahanan disini tidak konsisten mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara statistik dengan signifikan.

#### **2.2.2 Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus membandingkan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan nilai riil. Jadi perubahan pendapatan nasional hanya semata-mata disebabkan oleh perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi atau dengan kata lain pertumbuhan baru tercapai apabila jumlah barang dan jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Untuk mengetahui apakah perekonomian mengalami pertumbuhan, harus dibedakan PDRB riil suatu tahun dengan PDRB riil tahun sebelumnya (Sadono Sukirno, 2003).



Todaro (2010), menjelaskan bahwa terdapat tiga faktor atau komponen utama dalam pertumbuhan ekonomi dari setiap Negara, yaitu:

1. Akumulasi Modal

Akumulasi modal merupakan gabungan dari investasi baru yang di dalamnya mencakup lahan, peralatan fiskal dan sumber daya manusia yang digabung dengan pendapatan sekarang untuk dipergunakan memperbesar output pada masa datang.

2. Pertumbuhan penduduk

Pertumbuhan penduduk sangat berkaitan dengan jumlah angkatan kerja yang bekerja yang notabnya merupakan salah satu faktor yang akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Kemampuan pertumbuhan penduduk ini dipengaruhi seberapa besar perekonomian dapat menyerap angkatan kerja yang bekerja produktif.

3. Kemajuan teknologi.

Kemajuan teknologi menurut para ekonom merupakan faktor terpenting dalam terjadinya pertumbuhan ekonomi. Hal ini disebabkan karena kemajuan teknologi memberikan dampak besar karena dapat memberikan cara-cara baru dan menyempurnakan cara lama dalam melakukan suatu pekerjaan.

Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat dari pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut harga konstan. Pertumbuhan ekonomi di daerah dapat dilihat menggunakan PDRB per

kapita sehingga diketahui apakah kesejahteraan masyarakat sudah tercapai atau belum.

Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi (*rate of economic growth*) dapat dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$g = \frac{Y_t - Y_{t-1}}{Y_{t-1}} \times 100$$

Dimana:

$g$  : Pertumbuhan ekonomi

$y_t$  : Produk domestik bruto tahun sekarang

$y_{t-1}$  : Produk domestik bruto tahun yang lalu

### 2.2.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBN adalah rencana keuangan tahunan pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). APBN merupakan wujud pengelolaan keuangan negara sebagai konsekuensi penyelenggaraan pemerintahan yang menimbulkan hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat. APBN berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran (1 Januari - 31 Desember). APBN, perubahan

APBN, dan pertanggungjawaban APBN setiap tahun ditetapkan dengan Undang-Undang.

Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak banyak dipersoalkan. Yang banyak dipersoalkan adalah jumlah atau komposisi angka-angka yang tercantum didalamnya dari pada sifat hukum (rechtskarakter) dari Undang-undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Bahori, 1995: 15).

Pendapatan Negara dan hibah terdiri dari: 1) Penerimaan Dalam Negeri yaitu pajak dalam negeri, pajak perdagangan internasional, dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), 2) hibah yaitu bersifat bilateral dan multilateral. Sedangkan pembiayaan bersumber dari: 1) non utang, dan 2) utang, dengan proporsi yang bervariasi dalam setiap tahunnya.

Anggaran belanja negara mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pelaksanaan ketiga fungsi kebijakan fiskal, yaitu alokasi sumber daya, stabilisasi, serta distribusi. Fungsi alokasi diterjemahkan dalam bentuk pengalokasian dana melalui anggaran belanja negara untuk membiayai penyediaan barang dan jasa publik, salah satunya adalah untuk pertahanan Negara.

### **2.2.3.1 Mekanisme Penyusunan APBN**

Proses perencanaan dan pelaksanaan anggaran Negara diatur dalam Undang – Undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara, Undang – Undang nomor 1 tahun 2004, dan Undang-Undang nomor 15 tahun 2004, menyatakan bahwa sistem keuangan Negara, APBN

dilaksanakan apabila mendapatkan persetujuan dari DPR dan dituangkan dalam Undang-Undang APBN tiap tahunnya.

Untuk melaksanakan pasal 23 UUD 1945, pemerintah menyusun dan melaksanakan APBN dengan langkah sertra ketentuan berikut:

1. **Penyusunan.** Setiap tahun pemerintah berkewajiban menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) untuk masa tahun berikutnya. RAPBN merupakan rencana terinci, jumlah pengeluaran untuk melaksanakan kegiatan selama tahun yang akan datang, serta sumber-sumber penerimaan negara untuk membiayai kegiatan itu. Periode tahun anggaran adalah dari 1 April sampai dengan 31 Maret tahun berikutnya. Penyusunan ini dilakukan oleh Departemen Keuangan, berdasarkan bahan-bahan yang diterima dari Departemen-Departemen lain dan Biro Pusat Statistik, serta dengan memperhatikan Garis-Garis Besar Haluan Negara, Rencana Pembangunan yang disusun oleh BAPPENAS dan petunjuk-petunjuk Presiden.
2. **Pengesahan.** Pada awal Januari, RAPBN disertai Nota Keuangan diajukan oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk dibahas. Bila disetujui RAPBN disahkan menjadi APBN yang berlaku sebagai undang-undang.
3. **Pelaksanaan.** Setelah disahkan, APBN berlaku sebagai pedoman dan program kerja Pemerintah. Setiap pengeluaran uang negara harus berdasarkan Daftar Isian Kegiatan (DIK), disahkan oleh Menteri yang

bersangkutan, dipertanggungjawabkan dan dibukukan. Untuk mencegah penyelewengan, instansi yang berwenang mengeluarkan surat perintah membayar uang (SPMU) harus terpisah dari pihak yang memegang uangnya. Pemegang uang negara adalah Kantor Perbendaharaan Negara (KPN), dibawah pengawasan dan koordinasi Bank Indonesia. Untuk proyek-proyek pembangunan, pertama-tama harus diajukan Daftar Usulan Proyek (DUP). Bila disetujui harus disusun Daftar Isian Proyek (DIP).

4. **Pengawasan.** Untuk mengawasi penggunaan anggaran, setiap departemen harus mengadakan pengawasan intern, yang dilakukan oleh Inspektorat masing-masing. Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA) sebagai pengawas ekstern juga melakukan pemeriksaan.
5. **Perhitungan.** Setelah tahun anggaran berakhir, setiap departemen harus membuat laporan pertanggung jawab keuangan. Setelah disetujui Menteri Keuangan, dan diperiksa BAPEKA, laporan keseluruhan pelaksanaan APBN harus diajukan kepada DPR dalam bentuk Rancangan Undang-Undang Perhitungan Anggaran, yang sering disebut sebagai Realisasi Anggaran. Bila diterima oleh DPR, disahkan sebagai Undang-Undang Penetapan Perhitungan Anggaran.

#### **2.2.3.2 Dasar Hukum dan Struktur APBN**

Undang-Undang Dasar 1945 merupakan dasar hukum yang paling tinggi dalam struktur perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu pengaturan mengenai keuangan negara selalu didasarkan pada undang-

undang ini, khususnya dalam bab VIII Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen IV pasal 23 mengatur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bunyi pasal 23 (1): *Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan kemakmuran rakyat.*

pasal 23 (2): *Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya..*

Pasal 23 (3): *“Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu”.*

Adapun Struktur APBN Secara garis besar adalah :

- Pendapatan negara dan hibah,
- Belanja negara,
- Keseimbangan primer,
- Surplus/defisit anggaran

#### **2.2.4 Teori Kepadatan Penduduk**

Terdapat banyak hal yang mempengaruhi kualitas hidup manusia atau masyarakat, diantaranya adalah kepadatan penduduk, ketersediaan

fasilitas-fasilitas yang disediakan oleh Negara untuk kesejahteraan masyarakat, pola hidup yang dianut oleh masyarakat, norma yang berlaku di suatu daerah dan lain-lain.

Kepadatan penduduk adalah perbandingan antara jumlah penduduk dengan luas wilayah yang dihuni (Ida Bagoes Mantra, 2007). Jumlah penduduk setiap satu Km<sup>2</sup> atau setiap 1 mil<sup>2</sup> adalah ukuran yang biasa digunakan.

Persebaran yang tidak merata merupakan permasalahan dalam kepadatan penduduk. Usaha peningkatan kualitas penduduk akan lebih sulit dilakukan pada daerah yang kepadatannya tinggi. Hal ini menimbulkan permasalahan sosial ekonomi, kesejahteraan, Keamanan, ketersediaan lahan, air bersih dan kebutuhan pangan. Dampak yang paling besar adalah kerusakan lingkungan.

Menurut Christiani, Tedjo dan Martono (2014), Ledakan penduduk yang cepat menimbulkan dampak buruk bagi kehidupan masyarakat terutama dalam bidang sosial ekonomi masyarakat. Adapun dampak dari ledakan penduduk adalah :

- a. Semakin terbatasnya sumber-sumber kebutuhan pokok (pangan, sandang, papan, yang layak). Akibatnya sumber-sumber kebutuhan pokok tersebut tidak lagi sebanding dengan bertambahnya jumlah penduduk.

- b. Tidak tercukupinya fasilitas sosial dan kesehatan yang ada (sekolah, rumah sakit, tempat rekreasi) serta berbagai fasilitas pendukung kehidupan lain.
- c. Tidak tercukupinya lapangan pekerjaan bagi tenaga kerja yang ada, akibatnya terjadilah peningkatan jumlah pengangguran dan berdampak pada menurunnya kualitas sosial (banyak tuna wisma, pengemis, kriminalitas meningkat dan lain-lain).

Rumus kepadatan penduduk yaitu Jumlah penduduk dibagi dengan luas wilayah. Contohnya :  $400 \text{ jiwa} : 4 \text{ Km}^2 = 100/\text{Km}$ . Jadi setiap  $1 \text{ Km}^2$  hanya boleh terdapat 100 jiwa penduduk saja.

### **2.3. Hipotesis**

Berdasarkan rumusan masalah yang ada maka hipotesis dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran pertahanan Republik Indonesia.
2. Kemampuan keuangan Negara (APBN) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran pertahanan Republik Indonesia.
3. Kepadatan Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Anggaran pertahanan Republik Indonesia.